



BADAN KEAHLIAN DPR RI

*BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF
PARLIAMENT: EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY- MAKING*

RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2021

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

23 JUNI 2021

DASAR HUKUM

- Permen PANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) ditetapkan sebagai salah satu unit Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Sekretariat Jendral DPR RI, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI No: 208/SEKJEN/2021 tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Sekretariat Jendral DPR RI Tahun 2021.
- Penetapan di atas merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya pada tahun 2020 ZI Pusat PUU dinyatakan tidak memenuhi batas minimal survey Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

SK TIM ZI PUU

- Surat keterangan (*screening*) dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) tanggal 27 Mei 2021, Nomor: KP.01/365/SETJEN DPR RI/05/2021, yang menyatakan tidak ada pelanggaran disiplin oleh pegawai terhadap nama-nama terlampir yang akan dimasukkan dalam SK Tim ZI Pusat PUU.
- Sampai dengan saat ini SK Tim ZI Pusat PUU sedang disusun.

RENCANA AKSI ZI PUSAT PUU TAHUN 2021

- Sampai dengan saat ini, 6 area yang ada di ZI Pusat PUU sedang menyusun LKE, rencana aksi, dan mengumpulkan evidence sebagai bahan untuk penilaian ZI.
- Beberapa produk unggulan yang telah dimiliki oleh Pusat PUU, yaitu:
 - ❑ aplikasi Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-undang (SIMAS PUU), termasuk adanya videografis SIMAS PUU yang merupakan partisipasi masyarakat berbasis *online system* guna mewujudkan perancangan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegritas, efisien dan efektif terhadap penyusunan NA dan draf RUU di Pusat PUU BK DPR RI;
 - ❑ menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pusat PUU sesuai dengan proses bisnis Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dan mengacu pada Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pedoman Penyusunan SOP pemerintahan di Setjen DPR RI;

RENCANA AKSI ZI PUSAT PUU TAHUN 2021 (2)

- menyusun buku pedoman penyusunan Naskah Akademik RUU;
- penggunaan aplikasi *Cloud* sebagai sarana *sharing* data dan informasi terkait penyusunan NA dan RUU, saat ini telah menjadi *database* bahan dalam penyusunan NA dan RUU;
- membuat akun Media Sosial Pusat PUU yaitu *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* agar semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi Pusat PUU; dan
- melakukan persiapan survey on line.

TERIMA KASIH

- Jakarta, 23 Juni 2021